

KPAI: Penting Bentuk Satgas Perkawinan Anak untuk Turunkan Stunting

JAKARTA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta pemerintah untuk membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgas) terkait pencegahan dan penanganan perkawinan anak sebagai upaya percepatan penurunan stunting.

"Pentingnya pembentukan Satgas pencegahan dan penanganan perkawinan anak serta memperkuat bimbingan perkawinan bagi calon pengantin," kata Wakil Ketua KPAI Jasra Putra saat dikonfirmasi di Jakarta baru-baru ini.

Pasalnya perkawinan anak dan ketidaksiapan calon pengantin menjadi salah satu penyebab stunting pada anak. Pemerintah juga didorong untuk merekonstruksi paradigma pemenuhan gizi yang seimbang dalam keluarga dan masyarakat.

Selain itu, KPAI menekankan

pentingnya ketersediaan rumah layak huni bagi keluarga stunting dan penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui ketersediaan air bersih yang layak konsumsi, sanitasi yang layak, serta memastikan lingkungan tempat tinggal tidak tercemar kotoran hewan, sampah, dan limbah industri.

"Pemerintah daerah dan pemerintah desa agar menyediakan rumah layak huni bagi keluarga stunting," kata Jasra Putra.

Sementara terkait kualitas SDM, Tim Percepatan Penurunan Stunting Nasional dan Daerah diminta untuk mening-

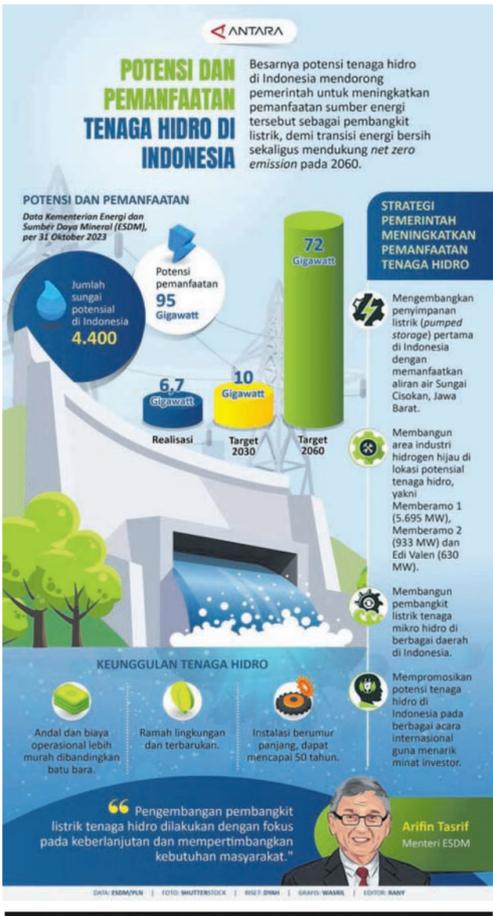


ANTARA/HO-KPAI
Menko PMK Muhadjir Effendy (tengah), Ketua KPAI Ai Maryati Solihah (keempat kiri), dan Wakil Ketua KPAI Jasra Putra (ketiga kanan) dalam Rakornas Ekspose Hasil Pengawasan Pemenuhan Hak Anak.

katkan kompetensi SDM tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tenaga sosial, dan aparat desa dalam upaya percepatan penurunan stunting.

KPAI menggelar Rakornas Ekspose Hasil Pengawasan Pemenuhan Hak Anak yang dilaksanakan sebagai tindak lanjut Rakorda yang memba-

has hasil pengawasan percepatan penurunan stunting dan pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2023. (ANTARA)



HOTLINE ANTARA 0812-8825-9462

Anggota DPR RI Ajak Masyarakat Sukseskan Pemilu 2024

PALANGKA RAYA - Anggota DPR RI Agustiar Sabran mengajak seluruh lapisan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah menyukseskan Pemilihan Umum 2024.

"Mari kita sukseskan Pemilu 2024 dengan turut serta menjaga keamanan dan ketertiban di setiap daerahnya masing-masing. Mari memilih pemimpin yang nantinya akan memimpin lima tahun dengan hati nurani," kata Agustiar Sabran di Palangka Raya belum lama ini.

Dia menuturkan kondisi provinsi berjuduk Bumi Tambun Bungai-Bumi Pancasila tersebut menjelang pesta demokrasi lima tahunan sekali itu terbilang masih aman dan tidak ada gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) sama sekali.

Termasuk, katanya, tahapan demi tahapan pemilu seperti pendaftaran calon di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat berjalan sesuai jadwal yang



ANTARA/Adi Wibowo
Agustiar Sabran

sudah ditentukan panitia penyelenggara. "Tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, itu artinya semuanya sudah berjalan sesuai dengan rencana dan tidak ada gangguan sampai saat ini dan daerah setempat relatif aman," ucapnya.

Meskipun tidak ada gangguan kamtibmas, ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terpecah belah dengan adanya kontestasi lima tahunan tersebut. Apalagi terpecah belahnya hanya akibat beda pili-

han pasangan calon presiden dan wakil presiden yang saat ini sudah mendaftar di KPU RI, kata dia. "Saya harap jangan sampai terpecah belah hanya akibat perbedaan pilihan pada Pemilu 2024," bebemnya.

Ia mengatakan jajaran Polda Kalteng dari berbagai satuan fungsi yang terdiri atas Samapta, Brimob, Intel, Polantas, dan lain sebagainya sudah disiagakan untuk menjaga kantor KPU dan Bawaslu Kalteng di Kota Palangka Raya. Personel yang berjaga-jaga di dua kantor penyelenggara pemilu tersebut dilengkapi dengan senjata laras panjang dan rompi antipeluru, bebemnya.

Tidak hanya itu, ujar dia, personel Samapta Polresta Palangka Raya gencar melaksanakan patroli di sekitar tempat-tempat rawan kriminalitas. Hal itu dilakukan agar tindak kejahatan serta gangguan kamtibmas tidak akan terjadi di daerah ini. (ANTARA)

FOTO CERITA Gelat Festival Wayang Orang Nasional di Kota Atlas



SUARA merdu gamelan mengiringi aksi sejumlah seniman saat tampil dalam pertunjukan wayang orang pada Festival Wayang Orang Nasional 2023 bertema 'Bersama Merawat Warisan Budaya Memajukan Wayang Orang Indonesia' di Taman Budaya Raden Saleh (TBRSS) Semarang, Jawa Tengah. Kemeriahan dan decah kagum tampak dari para penonton yang menyaksikan penampilan para seniman pada festival yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Semarang dalam rangka Hari Wayang Nasional.

Sebanyak delapan kelompok wayang orang, yakni Sanggar Wayang Orang Bharata Jakarta, Wayang Orang Magelang, Wayang Orang Yogyakarta, Wayang Orang Ngesti Pandawa Semarang, Wayang Orang Surabaya, Wayang Orang Gianyar Bali, serta Wayang Orang Sriwedari dan Surya Sumirat Mangkunegaran dari Surakarta tampil dalam pertunjukan yang digelar secara gratis untuk menghibur para penonton. Berbagai lakon juga ditampilkan dalam pertunjukan yang melibatkan seniman-seniman muda sebagai generasi penerus untuk mencintai, peduli, dan melestarikan kesenian wayang orang serta meru-

pakan upaya guna mewujudkan generasi muda kembali mencintai budaya tradisional asli Indonesia yang memiliki nilai-nilai spiritual, perjuangan, dan berguna untuk mempererat persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam festival tersebut juga dimenangkan dengan pameran wayang kulit nusantara, produk UMKK lokal, pertunjukan karawitan, dan tari tradisional dari sejumlah sanggar seni dan pelajar. Selama berlangsungnya Festival Wayang Orang Nasional 2023, jumlah penonton yang menyaksikan selalu melebihi kapasitas tempat duduk yang tersedia sehingga penyelenggara berinisiatif menyediakan layar lebar untuk mengganti rasa kecewa para pengunjung yang tidak bisa ke dalam area pertunjukan wayang orang di dalam Gedung Ki Narto Sabdo.

Pemerintah Kota Semarang menyatakan sebanyak 15 ribu pengunjung hadir selama berlangsungnya festival tersebut dan bertekad untuk menjadikan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang berjudul Kota Atlas itu bisa menjadi sebuah kota berbudaya yang dapat terus berkiprah dalam bidang seni dan budaya.***

Foto dan Teks: Makna Zaezar

ARTIKEL

Gerak Cepat Presiden dan Keberlanjutan IKN pada Tahun Politik

Oleh Indra Arief Pribadi

DEMI menarik partisipasi swasta dalam membangun Ibu Kota Nusantara (IKN), Pemerintah perlu menunjukkan keseriusan yang dimanifestasikan secara konkret dan mampu menyurutkan keraguan investor terhadap stabilitas politik di tengah keriuhan jelang Pemilu 2024.

Sejak September 2023, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan rencana untuk meninjau langsung pembangunan IKN setiap bulan. IKN disiapkan sebagai ibu kota masa depan yang menjelma sebagai tonggak pemerataan pembangunan ketika Jakarta sudah tak mampu menopang beban yang menyebabkan kemacetan, banjir, dan polusi tinggi.

Diperkirakan membutuhkan investasi Rp466 triliun, IKN juga dicitakan juga sebagai kota hutan, kota cerdas, kota serba-modern, dan kota ramah lingkungan. Dengan cita-cita setinggi itu, pembangunan IKN membutuhkan waktu panjang hingga 15-20 tahun. Artinya, pembangunan IKN memerlukan kesinambungan kebijakan baik dari sisi ekonomi, politik, dan hukum meski pemegang kekuasaan telah berganti.

IKN memang tidak hanya melulu soal ekonomi dan sosial, namun ada juga pengaruh politik dan hukum, mengingat megaprojek ini akan menyedot dalam skala besar sumber daya negara. Pemerintah merencanakan pendanaan IKN hanya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan sisanya dibayarkan 80 persen bersumber dari dana di luar APBN, seperti kerja sama Pemerintah dan swasta,

ataupun pendanaan penuh swasta. Mengingat pentingnya peran swasta dalam pembangunan IKN, Pemerintah menyadari perlunya gerak cepat untuk menyediakan infrastruktur inti dan infrastruktur dasar sebagai penunjang pembangunan.

Saat kunjungan kerjanya pada akhir September 2023, Jokowi telah melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) untuk pembangunan dua hotel swasta, satu rumah sakit, dan pusat pelatihan sepak bola milik Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Jokowi juga meninjau progres pembangunan dan memasang bilah pertama Garuda di Kantor Presiden, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

Sebulan kemudian atau pada 1-3 November 2023, Jokowi kembali melawat ke IKN untuk groundbreaking Bandara IKN, dua rumah sakit dari investor swasta, hotel, apartemen dan pusat perbelanjaan, sekolah bertarif internasional, Kantor BPJS Ketena-gakerjaan, revitalisasi SD negeri, pembangunan Kantor Bank Indonesia, dan PLTS 50 MW.

Pembangunan Tol Balikpapan menuju ke Nusantara progressnya sudah mencapai 55 persen. Terlihat pula progres proyek sumbu kebangsaan IKN. Akselerasi pembangunan fasilitas publik seperti sekolah, rumah sakit, dan juga pusat perbelanjaan dilakukan untuk menepis keraguan masyarakat dan investor terhadap IKN. Dengan dibangunnya fasilitas publik itu, aparat sipil negara (ASN) dan masyarakat juga tidak perlu ragu untuk pindah dan hidup di IKN.

Pemerintah juga membangun pionir



ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak Alrwamam
Presiden Joko Widodo memberikan sambutan saat groundbreaking Bandara Ibu Kota Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Rabu (1/11/2023).

pembangkit listrik ramah lingkungan di IKN melalui proyek PLTS 50 MW yang sedang dibangun PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero. PLTS tersebut mampu memproduksi energi hijau sekitar 93 Gigawatt hour (GWh) pertahun dan mampu mereduksi emisi sebesar 104 ribu ton CO2 per tahunnya. "Pertanyaan yang sekarang ini yang sangat penting, yang bertanya sekarang rumah tangga dan juga investor. 'Pak, listriknya ada, ndak? Siap atau tidak? Katanya green energy, di mana?' Jawabannya sore hari ini juga sudah ada," kata Jokowi pada 2 November 2023 saat groundbreaking PLTS 50 MW.

Untuk akses ke IKN, hingga Oktober 2023 ini, Pemerintah sedang menegakkan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne di IKN pada awal November 2023.

waktu tempuh dari sebelumnya 2,5 jam menjadi hanya 45 menit. Pada Desember 2024, Pemerintah juga menargetkan Bandara IKN rampung. Dari Bandara ke KIPP IKN, masyarakat hanya membutuhkan waktu 18 menit.

Berbagai groundbreaking pembangunan yang dilakukan begitu cepat itu dilakukan karena Pemerintah ingin membuktikan kesungguhan membangun Nusantara. Dengan kesungguhan itu, diharapkan sektor swasta dan dunia usaha segera berpartisipasi.

Pemerintah hingga awal November 2023 melalui Kementerian PUPR sedang membangun KIPP yang berisi kantor kementerian, Istana Presiden, Wakil Presiden, dan Kantor Presiden. Pemerintah juga memastikan ketersediaan infrastruktur dasar seperti listrik,

air, dan hunian pekerja pegawai Pemerintah. Hingga Desember 2023, sudah terdapat investasi senilai Rp45 triliun yang siap direalisasikan di IKN.

Tepis kekhawatiran dunia usaha
Swasta dan dunia usaha tentu mengharapkan pembangunan IKN berkesinambungan meskipun ada keriuhan politik menjelang Pemilu 2024. Untuk meyakinkan pengusaha, perlu pengejawantahan dan komitmen kuat dari tataran elit politik, serta realisasi konkret progres pembangunan IKN sebelum pemerintahan berganti pada Oktober 2024.

Wakil Ketua Asosiasi Industri Permelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Anne Patricia Sutanto mengatakan pihaknya siap terlibat dalam pembangunan IKN meski ada kekhawatiran terhadap kepastian politik dan risiko hukum. Tebersit ada rasa takut salah langkah dalam membangun IKN dan berujung dipeniksa aparat penegak hukum.

Oleh karena itu, Anne meminta jajaran Pemerintah juga perlu secara cermat dan hati-hati dalam membangun IKN. Pembangunan IKN jangan sampai diakselerasi secara asal-asalan, melainkan harus memperhatikan aspek hukum juga. "Saya tahu, tahun 2024 Bapak (Presiden) ingin kita upacara di sini, tapi nuwun sewu, Pak, kami siap sat set, tapi juga ada alon-alon asal kelakon-nya. Mengingat edukasi dan penegakan hukum sama pentingnya dengan IKN," kata Anne di IKN pada awal November 2023.

Namun, Presiden Jokowi menepis kekhawatiran investor karena faktor pemilu. Menurut Kepala Negara,

bangsa Indonesia sudah dewasa dalam berdemokrasi. Pengalaman dalam melaksanakan pemilu langsung sejak 2009, 2014, 2019, menunjukkan Indonesia bisa menjaga kedamaian dan kerukunan dalam pesta demokrasi.

Selain itu, Jokowi menilai IKN juga memiliki legitimasi politik yang kuat. Percepatan pembangunan IKN bertandaskan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 mengenai IKN yang didukung oleh 93 persen anggota fraksi-fraksi DPR. Jokowi meyakini UU IKN memberikan jaminan politik dan hukum bagi investor yang ingin berpartisipasi membangun IKN.

Di sisi lain, Jokowi juga mengajak dunia usaha untuk turut menjaga stabilitas dengan tidak asal berkomentar di publik terkait pemilu. Alih-alih turut 'memanaskan' suasana politik pemilu, Jokowi minta dunia usaha untuk memanfaatkan kesempatan pertama dan kesempatan emas yang tidak akan terulang lagi untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN.

Kepala Negara juga mengklarifikasi bahwa akselerasi IKN tidak asal-asalan. Pada 2024, IKN baru dapat digunakan untuk upacara HUT Kemerdekaan RI. Sementara, pembangunan IKN secara keseluruhan, kata Jokowi, baru rampung pada 15-20 tahun ke depan. Kecepatan pembangunan IKN juga bergantung pada partisipasi swasta dan dunia usaha.

Progres pembangunan yang cepat dari Pemerintah diharapkan dapat memantik komitmen swasta untuk bersama-sama menggebut pembangunan kota masa depan bagi generasi anak cucu. Karena, IKN hanya bisa terwujud dengan kesungguhan upaya bersama.***